

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	SUARA PEMBARUAN	1	20-08-2002

EKSKLUSIF

Kilang Minyak Baru (2)

Bank Dunia Gugat Monopoli Pertamina

Oleh Wartawan "Pembaruan"
Susana Kurniasih

IZIN usaha pengolahan minyak mentah yang ditawarkan Pemerintah Indonesia sejak 1992 ternyata belum menarik minat perusahaan multinasional untuk masuk ke sektor itu. Keengganan untuk memasuki sektor itu berlanjut meski pemerintah kemudian mengubah UU Migas pada 2001.

Berdasar UU baru tersebut, investor swasta dimungkinkan membangun usaha pengolahan minyak mentah dan memasarkan produknya di Indonesia. Agar swasta tidak merugi,

Dengan dihentikannya monopoli, investor lain bisa ikut berkiprah di sektor hilir migas.

pemerintah juga berjanji akan menghentikan subsidi penjualan bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat mulai 2004. Harga BBM akan dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.

Rencana pemerintah itu tetap saja ditanggapi dengan sikap dingin oleh perusa-

haan-perusahaan migas multinasional. Sikap dingin itu dapat dipahami, karena struktur harga BBM di dalam negeri dinilai terlalu rendah. Mereka akan rugi terjun ke sektor itu bila harga minyak di dalam negeri masih rendah.

Perusahaan-perusahaan multinasional itu juga enggan, karena ruang gerak mereka bakal terbentur pada sistem pemasaran Pertamina yang terintegrasi. Sistem yang dibangun Pertamina itu diibaratkan tembok tebal yang tidak mungkin mereka tembus. Pertumbuhan permintaan BBM dalam negeri yang melaju lima sampai enam persen per tahun, juga tidak dianggap sebagai perangsang.

Dengan pertumbuhan seperti itu, kebutuhan BBM dalam negeri yang sekarang mencapai 162.478 kiloliter per hari akan meningkat menjadi 181.006 kilo liter per hari pada 2005. Tanpa kilang baru, Indonesia akan memerlukan lebih banyak lagi pasokan minyak impor.

Keengganan perusahaan-perusahaan multinasional untuk membangun kilang minyak baru di Indonesia segera mendapat tanggapan Bank Dunia. Country Manager Bank Dunia untuk Indonesia, Mark Baird, menyurati Menteri Keuangan, Budiono, 28 Mei lalu. Dia mengemukakan langkah-langkah yang harus ditempuh Indonesia untuk merestrukturisasi kegiatan sektor hilirnya.

Bank Dunia menginginkan agar dihentikannya monopoli yang selama ini dipegang Pertamina. Dengan dihentikannya monopoli, investor lain bisa ikut berkiprah di sektor hilir migas. Terbuka peluang bagi mereka untuk membeli aset BUMN itu. Bank Dunia juga memberi rincian langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah dan Pertamina, dalam merestrukturisasi sektor hilir.

Bank dunia ingin Pemerintah Indonesia menciptakan sistem industri hulu minyak dan gas yang *fair* dan transparan. Pemerintah digi-

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

ring supaya membentuk sekurang-kurangnya satu atau dua perusahaan pengolahan dan pemasaran baru selain Pertamina. Konsekuensinya aset pemerintah yang berupa kilang dan aset strategis lainnya, tidak lagi menjadi milik Pertamina. Aset-aset itu akan menjadi milik perusahaan-perusahaan yang terpisah.

Pemerintah Indonesia sekarang memiliki lima kilang minyak, yaitu di Cilacap, Balikpapan, Musi, Dumai, dan Sungai Pakning. Jauh hari sebelum UU Migas disahkan, Pertamina sudah meminta pemerintah agar aset-aset tersebut ditransfer ke Pertamina. Tujuannya agar Pertamina bisa mengontrol seluruh operasi kilang minyak di Indonesia.

Rekomendasi Bank Dunia terlihat mengesampingkan hal itu, karena Pertamina juga didesak membuat *joint venture* atau membuka akses pengaturan dan pemipaan untuk menciptakan iklim yang lebih kompetitif. "Pengaturan yang demikian akan menciptakan dasar untuk kompetisi dan akan mempertinggi prospek investasi langsung yang lebih cepat," kata Mark Baird.

Bank Dunia juga keberatan dengan sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 yang memberi hak istimewa kepada Pertamina. Perusahaan milik negara itu diizinkan memasarkan produknya sampai tahun 2005. Langkah itu dinilai oleh Bank

Dunia sebagai memperpanjang monopoli. Cara itu dianggap menghambat pelaku bisnis baru untuk memasuki pasar Indonesia dalam jangka pendek atau menengah.

Bank Dunia menuding Pertamina telah melakukan persiapan untuk mempertahankan monopolinya di Pulau Jawa dan tempat-tempat pemasaran lain yang "empuk". Tudingan itu didasarkan pada keinginan Pertamina memiliki semua aset yang ada di hilir, termasuk kilang-kilang, terminal penting, fasilitas penjualan dan pemipaan. Pertamina juga mengambil saham dalam penyelesaian proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama di Tuban, Jawa Timur.

"Dengan skema ini, Pertamina menandatangani perjanjian bakal memperoleh hak istimewa untuk mendapatkan HOMC atau Hight Octan Mogas Componen (bahan baku pembuatan premium, Red.), minyak tanah, dan minyak diesel," kata Baird. Ia lebih kesal lagi karena Pertamina juga berencana mengembangkan sebuah perusahaan pengolahan di Tuban dengan mitra asingnya.

Yang juga membuat Bank Dunia kesal, yaitu Pertamina juga mengunci pemasaran *retail* melalui perjanjian jangka panjang dan selalu berupaya meningkatkan jumlah stasiunnya. BUMN Migas itu juga diduga telah mengajukan usulan ke pemerintah agar membuat aturan yang bisa

membatasi variasi harga jual minyak eceran di daerah.

Bank Dunia beranggapan bila kompetisi baru dimulai tahun 2005, hal itu sesungguhnya tidak akan pernah terjadi. Gerak pemain baru sudah sangat terbatas. Hal ini utamanya terjadi di Pulau Jawa yang merupakan pasar paling gemuk dan paling diincar calon investor baru. Karena itulah, Bank Dunia meminta agar pemerintah tidak mentransfer semua aset hilirnya ke Pertamina. Bahkan agar kompetisi di Pulau Jawa benar-benar bisa diterapkan, Kilang Cilacap disarankan diberikan kepada BUMN Migas baru selain Pertamina. Kilang milik pemerintah itu sekarang digunakan Pertamina. Kilang itu mampu mengolah minyak mentah hingga 348.000 barel per hari dengan biaya yang sangat efisien.

Pemerintah juga dipaksa mengizinkan semua aset penting lainnya, misalnya pipa, fasilitas penjualan, dan terminal, dapat diakses oleh semua kompetitor. Selain itu, biaya yang harus dibayarkan kepada pemain baru juga harus sama. "Dengan demikian tidak ada praktik diskriminasi dalam hal biaya yang dibebankan kepada tiap perusahaan," tambah Baird.

Bank Dunia juga berharap pengembangan aset-aset penting, misalnya Terminal Balongan, juga harus dibuka untuk pemain baru. ♦